

Rabu, 10 November 2010S

Masalah Tender, Penyebab Korupsi Baju Hansip



Dokumen/Equator

Ary Pudyanti

PONTIANAK. Kejaksaan Tinggi Kalbar tetap konsisten memproses korupsi pengadaan pakaian Hansip di Badan Kesbangpolinmas Kalbar dengan menjerat empat tersangka. Dimana letak kesalahan awal kasus tersebut?

"Kasus ini bermula dari pelaksanaan tender," kata Ary Pudyanti SE, mantan Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap APBD Kalbar tahun 2009 kepada *Equator* di kantor DPRD Kalbar, Selasa (9/11).

Pansus menemukan kejanggalan dalam proses tender. Kejanggalan yang dimaksud cukup fatal dan bisa berpengaruh terhadap proses-proses

Halaman 7

Masalah Tender

berikutnya. Saat tender, panitia tidak membuat HPS (Harga Perkiraan Sementara, red) untuk barang yang ditender. Padahal HPS sangat penting untuk pembandingan harga barang dengan harga pasaran, tegas Ary.

Berdasarkan Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, ada beberapa hal yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan tender, termasuk membuat HPS. Tapi ini yang tidak dibuatkan, ucap Ary yang juga Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kalbar.

Tidak dibuatnya HPS membuka peluang munculnya *markup* harga barang. Hal ini pula yang memungkinkan BPK Perwakilan Kalbar menemukan indikasi tersebut.

Pihak BPK Perwakilan Kalbar membenarkan barang yang dibeli terdapat selisih sekitar Rp

4,6 miliar dibandingkan harga jual di pasaran. Dana pengadaan baju Hansip untuk kepentingan pengamanan Pemilu Legislatif 9 April 2009 dan Pilpres 8 Juli 2009 ini diketahui bermasalah setelah diaudit BPK Perwakilan Kalbar.

Pengadaan baju Hansip itu dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama Desember 2008 dengan pagu sekitar Rp 4,5 miliar untuk pengadaan sekitar 8 ribu stel pakaian Hansip.

Tahap kedua Februari hingga Maret 2009 dengan pagu dana sekitar 4,8 miliar untuk pengadaan 7.950 stel pakaian Hansip.

Pada pengadaan tahap pertama, BPK Perwakilan Kalbar menemukan indikasi korupsi sekitar Rp 2,2 miliar. Sedangkan pada pengadaan tahap ke dua, juga ditemukan indikasi korupsi

..... dari halaman 1

sekitar Rp 2,4 miliar.

Terkait polemik surat Gubernur yang menjamin penangguhan atau pengalihan status tahanan Tonny Ferdy (TF), Kepala Badan Kesbangpolinmas Kalbar yang menjadi salah satu tersangka kasus pakaian Hansip itu, Ary yakin Gubernur bisa mengambil posisi yang terbaik. Saya yakin Gubernur bersikap bijak, tutur Ary.

Sikap bijak yang dimaksudnya tidak hanya dalam proses hukum. Gubernur pasti bijak dalam menilai kapan harus mencari Plt Kepala Badan Kesbangpolinmas. Sebab posisi ini memiliki keterkaitan dengan kinerja pemerintah, katanya.

Legislator asal Dapil Kota Pontianak itu juga tidak sependapat dengan penilaian sejumlah orang yang mengaitkan kasus pakaian Hansip dengan politik. Ia berharap agar semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

Jangan semua memberikan pernyataan yang meresahkan. Biarkan proses hukum berjalan. Kita serahkan saja penanganannya ke aparat hukum (Kejati, red), pungkas legislator yang sering bicara vokal ini. (bdu)